



## Jangan Coba-Coba Menimbun

**JAJARAN** kepolisian mengingatkan masyarakat Kota Yogyakarta untuk tidak menimbun minyak goreng (migor) di tengah kelangkaannya sekarang ini. Untuk meminimalisasi adanya penimbunan migor, polisi telah membentuk satgas pangan yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Andhyka Donny Hendrawan mengatakan, satu unit Satgas Pangan sudah beroperasi sejak awal pekan ini. "Kami rutin setiap hari mengecek ke toko, retail, dan pasar-pasar. Kami monitoring ketersediaan minyak go-

reng ini," jelasnya, Kamis (17/3).

Andhyka menjelaskan, satgas pangan juga menyasar ke seluruh distributor yang tersebar di Kota Yogyakarta. Hal itu dilakukan guna memastikan tidak ada penimbunan migor. "Dari distributor sudah kami cek dan semua minyak terdistribusi," terang dia.

Ia mengatakan selama pengawasan dan monitoring ketersediaan migor yang dilakukan di seluruh distributor dan toko yang ada di Yogyakarta, pihaknya belum ditemukan indikasi penimbunan. "Belum ada. Tapi kami ingatkan jangan sampai ada yang me-

● ke halaman 11

### Jangan Coba-Coba

● Sambungan Hal 1

lakukan hal ini. Tetap akan sanksi tegas," ungkap dia.

Ditemui di UGM Yogyakarta, Kamis (17/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, harga migor kemasan berdasarkan nilai keekonomiannya. Artinya, harga migor kemasan per liter bisa lebih dari Rp14 ribu, bahkan sampai Rp25 ribu per liter lantaran diserahkan kepada mekanisme pasar. Har-

ga eceran tertinggi (HET) kini hanya diterapkan untuk migor curah.

Diketahui, HET untuk migor curah naik dari Rp11.500 menjadi Rp14 ribu per liter. Kebijakan ini diambil lantaran melihat perkembangan situasi di pasar. Ketidakpastian kondisi global menyebabkan kenaikan harga pasokan energi dan pangan yang mengakibatkan kelangkaan ketersediaan, termasuk ketersediaan *Crude Palm Oil* (CPO), bahan baku untuk migor.

"Hari ini (kemarin), kita su-

dah melihat di pasar modern seluruhnya ada barangnya. Untuk di pasar tradisional, Menteri Perindustrian (Menperin) diminta untuk mengeluarkan Peraturan Menteri," paparnya.

Tidak hanya itu, untuk mekanisme subsidi, hal tersebut bakal diatur oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Jadi mungkin dalam waktu singkat minyak goreng curah akan masuk di pasar. Yang penting distribusi akan dikawal oleh satgas pangan dari Polri," tandas Airlangga. **(hda/ard)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005